



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI MANADO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIDIK WURYANTO
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 17334

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 850.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m²/110 m² di KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1530 m²/300 m² di KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 639.000.000

1. MOTOR, SUZUKI SMASH SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOBIL, TOYOTA VIOS SEDAN Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 74.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
5. MOBIL, TOYOTA /KIJANG INNOVA MINI BUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
6. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
7. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S MT / MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 101.620.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 314.300.331

F. HARTA LAINNYA Rp. ---



Sub Total	Rp.	1.904.920.331
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.904.920.331

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.